

BAB II

ORGANISASI MILITER JEPANG PADA MASA PERANG DUNIA II

Militer merupakan alat utama negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, terlebih dalam kondisi perang. Peran militer Jepang sebagai sebuah organisasi sangat berpengaruh dalam setiap kebijakan perang yang diambil oleh pemerintah Jepang. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang militer Jepang sebagai sebuah organisasi yang menjalankan kebijakan perang Jepang pada masa Perang Dunia II tahun 1942-1945 dan kebijakan-kebijakan yang diambil militer Jepang, khususnya kebijakan jugun-ianfu.

Secara sederhana, bab ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama berisi profil militer Jepang pada masa PD II, yang terdiri dari struktur organisasi militer Jepang dan garis komando militer Jepang di Indonesia. Bagian kedua berisi kebijakan-kebijakan militer Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945. Bagian ketiga berisi kasus-kasus penyebaran jugun-ianfu di Indonesia sebagai salah satu bentuk kebijakan militer Jepang di Indonesia. Bagian keempat berisi kesimpulan dari penjelasan bab ini.

2.1 Profil Militer Jepang Pada Masa Perang Dunia II

Terbentuknya rezim militer Jepang di kawasan selatan (*nanyo-southern area*), termasuk negara–negara Asia Tenggara, ditentukan berdasarkan Konferensi Penghubung antara Markas Besar Kekaisaran dan Kabinet Jepang melalui politik tingkat tinggi di Tokyo yang diadakan pada tanggal 20 November 1941. Bentuk pemerintahan militer dipilih dengan tujuan untuk mempercepat pendudukan daerah selatan beserta penguasaan sumber daya vital bagi pertahanan nasional Jepang, memulihkan keamanan, dan menjamin swasembada ekonomi bagi militer Jepang. Untuk menjalankan roda pemerintahan, organisasi pemerintahan yang sudah ada sebelumnya harus dimanfaatkan di bawah kontrol militer Jepang. Terbentuknya rezim militer Jepang yang kuat merupakan kunci utama keberhasilan pendudukan Jepang di daerah-daerah Asia Timur dan Asia Tenggara (Kemendikbud, 2011).

2.1.1 Struktur Organisasi Militer Jepang Pada Masa Perang Dunia II

Setiap negara di dunia memiliki unit angkatan bersenjata yang digunakan sebagai alat untuk melindungi negara dari serangan musuh atau situasi perang. Menurut Amiroeddin Syarif, militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa perlawanan pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Jepang sebagai sebuah negara berdaulat, juga memiliki organisasi militer yang bertugas menjalankan fungsi pertahanan.

Sistem pemerintahan yang dianut Jepang pada masa Perang Dunia II adalah sistem parlementer (Partai Tunggal) dengan Kaisar sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Tetapi karena bentuk negara yang dianut Jepang adalah Kekaisaran, maka kekuasaan tertinggi berada di tangan Kaisar Jepang. Kaisar Jepang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Organisasi Militer Jepang. Organisasi militer Jepang pada masa Perang Dunia II terdiri dari dua unit, yaitu Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kedua unit ini bergerak di bawah perintah Menteri Peperangan yang bertanggung jawab langsung kepada Kaisar Jepang (Smethurst, 2012).

2.1. 1.1 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (*Dai-Nippon Teikoko Rikugun*)

Angkatan Darat Jepang didirikan pada tahun 1867-1945 yang berada di bawah Staff Gabungan Angkatan Darat (*Sanbo Honbu*) dan Kementerian Angkatan Darat (*Rikugunsho*) dengan panglima tertinggi adalah Kaisar Jepang. Angkatan Darat Jepang bermarkas besar di pusat Markas Besar Kekaisaran (*Daihonei*) yang di dalamnya juga terdapat Staf Wakil Gabungan Angkatan Darat dan Staf Angkatan Laut, serta Menteri Peperangan dan Inspektur Jendral Militer. Anggota Angkatan Darat Jepang terdiri dari laki-laki berusia antara 17 – 40 tahun yang sebelumnya telah mengikuti program wajib militer (Jowett, 2002: 3).

Pada awalnya, ketika Angkatan Darat Kekaisaran Jepang didirikan tahun 1867, yang menjadi anggotanya adalah pensiunan samurai dari wilayah Satsuma dan Chosu yang setia pada Kaisar Meiji. Sehingga, setelah berdirinya pemerintahan Meiji, untuk menjaga Jepang dari imperialism barat, maka orang-orang mantan anggota samurai dan militer yang setia terhadap pemerintah diberikan pelatihan militer dan dijadikan anggota Angkatan bersenjata negara Jepang (Jowett, 2002: 4).

Pasukan Angkatan Darat Jepang menjadi 3 unit bagian yaitu infantri, kavaleri dan artileri serta beberapa detasemen yang terpisah yang namanya disesuaikan dengan nama komando yang ditugaskan dalam operasi-operasi tertentu. Infantri merupakan kekuatan yang menjadi tulang punggung dan ujung tombak Angkatan Darat Jepang dipertempuran. Unsur persenjataan menjadi titik penting yang harus diperhatikan baik dalam hal senapan, bayonet, granat, pistol, dan pelontar granat. Pada tahun 1930-an Jepang merupakan negara yang organisasi infantrinya memiliki persenjataan terbaik. Akan tetapi, sejak tahun 1943 Jepang mengalami kemunduran dan tertinggal di belakang infantri sekutu (Jowett, 2002: 13).

Selain infantri Angkatan Darat Kekaisaran Jepang juga memiliki kavaleri meliputi tank-tank perang yang dioperasikan selama pertempuran. Dalam pertempuran Asia-Pasifik. Dalam periode 1931-1938 Jepang memproduksi 1700 tank baru dan jumlahnya tidak bertambah secara signifikan ditahun-tahun

berikutnya karena prioritas pertama adalah memproduksi pesawat tempur sebagai kekuatan udara. Selanjutnya, artileri kekaisaran Jepang yang dipakai Angkatan Darat selama periode perang Pasifik tergolong cukup baik dan tidak terlalu ketinggalan zaman. Artileri yang dilengkapi dengan berbagai kaliber yang tergolong cukup banyak (Jowett, 2002: 14).

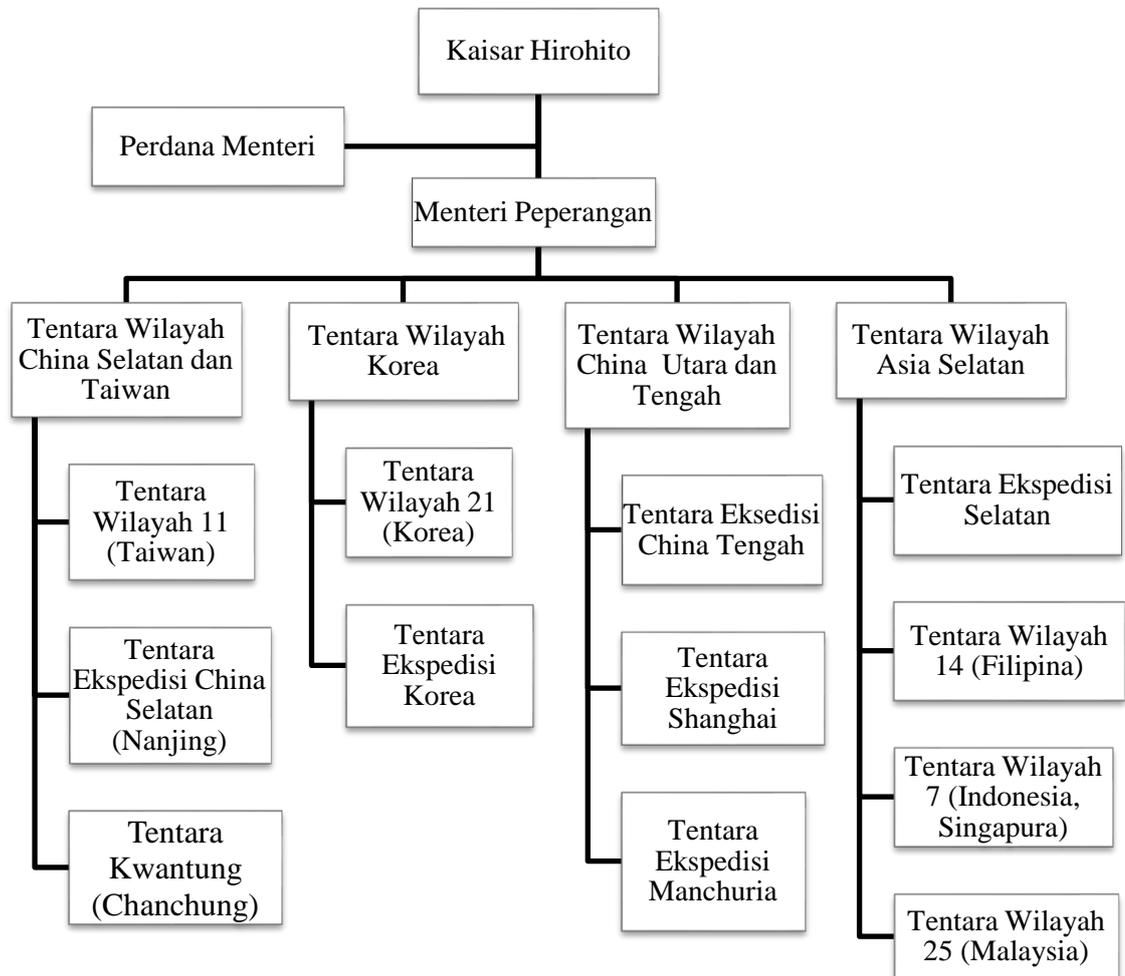
2.1. 1.2 Angkatan Laut Kekaisaran Jepang

Angkatan Laut Jepang didirikan pada bulan Mei 1920. Angkatan laut Jepang tidak hanya terdiri dari tentara angkatan laut, tetapi juga tentara yang bertugas di udara. Tentara yang bertugas di udara harus mengikuti Program Teknik Penerbangan (*Hiko Jutsu Renshu Sei*) untuk para perwira atau Program Pelatihan Cadangan Penerbangan (*Hiko Yoka Reshu Sei*) untuk non-perwira terlebih dahulu. Markas besar Angkatan Laut Jepang terletak di tepi Danau Kasumigaura. Pada saat Perang Dunia II antara tahun 1941-1943, jumlah tentara Angkatan Laut Jepang bertambah pesat untuk kebutuhan perang (Jowett, 2002: 19).

Salah satu unit Angkatan Laut Jepang yang terkenal adalah pasukan *Kamikaze*, yaitu pasukan bunuh diri yang terdiri dari para penerbang handal. Pasukan kamikaze terdiri dari orang-orang yang terlatih, kejam, berani di segala medan perang, dan sangat loyal hingga rela mati demi negaranya. Tahun-tahun modernisasi sebelumnya yaitu pada tanggal 4 Januari 1882 Kaisar Meiji bertitah kepada prajurit dan pelaut perang Jepang yaitu “Tugas lebih berat daripada gunung, sedangkan kematian lebih ringan daripada sehelai bulu”. Dalam titah tersebut tercermin upaya negara Jepang dalam menanamkan nilai keprajuritan terhadap setiap pasukannya. Titah tersebut menjadi dasar perilaku yang menekankan kesetiaan mutlak, disiplin, keberanian, harga diri dan kesederhanaan terhadap kaisar dalam mencapai kebangkitan dari masa lalu feodal menjadi negara yang berjaya di dunia imperial. Berdasarkan tradisi Jepang seperti konfusianisme dan nilai-nilai budaya samurai, titah seorang Kaisar menjadi inspirasi para prajurit untuk melakukan tindakan-tindakan menakutkan yang menunjukkan keberanian, pengorbanan diri, dan kesetiaan pada tugas (Jowett, 2002: 20).

Pada bagan 2.1 adalah bagan organisasi militer Jepang pada masa PD II

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Militer Jepang



Sumber: Kemendikbud, 2011

Setiap struktur tentara Jepang terdiri atas Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Tentara Wilayah China Selatan, Taiwan, Korea, China Utaran, China Tengah, dan Asia Selatan masing-masing dipimpin oleh Gubernur Jendral. Sedangkan unit-unit dibawahnya (Tentara Wilayah 11, Tentara Ekspedisi China Selatan, Tentara Wilayah 21, Tentara Ekspedisi Korea, tentara Ekspedisi Shanghai, Manchuria, China Tengah, Tentara Ekspedisi Selatan, Tentara Wilayah 14, 7 dan 25) dipimpin oleh seorang komandan (berpangkat Jendral), yang membawahi kepala staf dalam unit-unit yang lebih kecil. Adapun nama-nama

pejabat tinggi dalam militer Jepang pada masa Perang Dunia II adalah sebagai berikut:

- 1) Kaisar Hirohito adalah Kepala Negara Jepang dan Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Laut Jepang. Kaisar memiliki kekuatan politik yang bersifat independen, di atas kekuatan legislatif, yudikatif, dan administratif yang dimiliki Pemerintah Jepang. Perdana Menteri, Kementerian Perang, Kementerian Dalam Negeri, dan anggota kabinet lainnya terikat oleh Konstitusi Meiji untuk memberikan nasihat kepada Kaisar Hirohito mengenai hubungan politik domestik maupun internasional serta operasi militer Jepang. Gubernur-Jenderal Taiwan dan Korea juga langsung melapor kepadanya.
- 2) Rikichi Ando adalah Komandan Tentara Wilayah ke-21 dari Bulan November 1938 sampai Bulan Februari 1940. Kemudian ia menjabat sebagai Komandan wilayah China Selatan dari Bulan Februari sampai Bulan Oktober 1940. Ando juga menjabat sebagai Komandan Taiwan dari Bulan November 1941 sampai Bulan Februari 1945. Kemudian sejak Desember 1944 sampai akhir masa perang, Ando menjabat sebagai Gubernur Jenderal Tentara Wilayah 11 yang menduduki Taiwan.
- 3) Shunroku Hata bertindak sebagai Komandan Tentara Wilayah 11 Taiwan dari Bulan Agustus 1936 hingga Bulan Agustus 1937. Kemudian menjabat sebagai Komandan Tentara Ekspedisi China Tengah pada tahun 1938. Pada Bulan Agustus 1939, Hata diangkat menjadi Menteri Peperangan sampai Bulan Juli 1940. Lalu pada bulan Maret 1941, ia ditunjuk sebagai Komandan Tentara Ekspedisi China Selatan hingga bulan November 1944.
- 4) Seishiro Itagaki menjabat sebagai Menteri Peperangan dari Bulan Juni 1938 sampai Bulan Agustus 1939 dan bertanggung jawab langsung kepada Kaisar Hirohito. Itagaki ditunjuk sebagai Kepala Staf Tentara Ekspedisi China dari Bulan Agustus 1939 sampai Bulan Juli 1941. Ia juga dipercaya sebagai Komandan Tentara Korea dari Bulan Juli 1941

sampai Bulan April 1945, sekaligus menjabat sebagai Komandan Wilayah ke-7 yang ditempatkan di Indonesia.

- 5) Seizo Kobayashi adalah Gubernur-Jenderal Tentara Taiwan dari 1936 sampai 1940. Ia juga diberi amanah sebagai Menteri Kabinet sejak Desember 1944 sampai Maret 1945. Kobayashi memiliki kewajiban untuk melapor secara langsung kepada Kaisar.
- 6) Iwane Matsui menjabat sebagai Komandan Tentara Ekspedisi Shanghai dan Tentara Wilayah China Tengah selama tujuh bulan dari tahun 1937 sampai tahun 1938.
- 7) Hisauchi Terauchi adalah Komandan wilayah China Utara sejak bulan Agustus 1937 sampai bulan Desember 1938. Ia juga menjabat sebagai Komandan Tentara Ekspedisi Selatan yang mencakup wilayah Filipina, Indonesia, Malaysia, Timor, dan Burma sejak bulan November 1941 hingga akhir masa perang tahun 1946. Sebelumnya, Terauchi pernah menjabat sebagai Menteri Peperangan dari bulan Maret 1936 sampai bulan Februari 1937.
- 8) Hideki Tojo adalah Kepala Staf Tentara Kwantung (Guangdong) pada 1937, yang kemudian unit Tentara ini dibubarkan pada tahun 1939. Kemudian pada bulan Mei 1938, ia diangkat menjadi Wakil Menteri Peperangan. Lalu pada bulan Oktober 1941 sampai bulan Juli 1944, Tojo dipercaya menjadi Perdana Menteri menggantikan Perdana Menteri sebelumnya yaitu Pangeran Konoye, sekaligus Menteri Peperangan. PM Tojo memiliki julukan “Si Otak Pisau Cukur” karena sifatnya yang keras dan kejam. PM Tojo lah yang membawa Jepang terjun dalam kancah Perang Dunia II. Sebagai Perdana Menteri, Hideki Tojo berkewajiban untuk mengevaluasi dan melaporkan kepada Kaisar semua tindakan menteri-menteri yang terlibat dalam pelaksanaan perang. Sejak bulan Februari sampai bulan Juli 1944, Jendral Tojo juga menjabat sebagai *Chief of General Staff of the Army*.
- 9) Yoshiji Umezu menjabat sebagai Wakil Menteri Peperangan sejak bulan Maret 1936 hingga bulan Mei 1938. Kemudian menjadi Komandan

Tentara ke-1 pada Mei 1938. Setelah itu, Umezu menjabat sebagai Komandan Tentara Kwantung (Guangdong) sejak bulan September 1939 sampai bulan Juli 1944. Umezu lalu ditunjuk sebagai *Chief of General Staff of the Army* pada bulan Juli 1944 menggantikan Hideki Tojo.

- 10) Tomoyuki Yamashita menjabat sebagai Komandan Jenderal Tentara ke-14 sejak bulan September 1944 hingga bulan September 1945. Yamashita bertugas mengarahkan dan bertanggung jawab atas tentara Jepang yang beroperasi di wilayah Filipina, termasuk di daerah Mananique.
- 11) Koiso Kuniaki menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang sejak bulan Juli 1944 sampai bulan April 1945 menggantikan PM Hideki Tojo. PM Koiso adalah orang yang mencetuskan “Janji Koiso” yang berisi janji pemberian kemerdekaan bagi negara-negara pendudukan Jepang, termasuk Indonesia untuk menarik simpati dan mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang diduduki (Komnas HAM, 2013).

Selama Perang Dunia II berlangsung, Militer Jepang mengalami pergantian pemimpin berkali-kali karena menyesuaikan dengan kondisi perang di lapangan. Jendral-jendral yang mampu bergerak cepat dan tegas akan diberikan jabatan-jabatan strategis dalam organisasi militer Jepang. *General Staff of the Army* dibentuk pada akhir tahun 1943, setelah Jepang mengadakan konferensi dengan negara-negara pendudukannya (China, Thailand, Manchuria, Burma, Thailand, Malaysia, Timor, dan Indonesia) pada November 1943. Konferensi ini bertujuan membentuk “Asia Timur Raya” di bawah kepemimpinan Jepang dan pemberian janji kemerdekaan pada beberapa negara yang dianggap sudah siap, seperti Burma dan Filipina (Oktorino, 2016: 199).

Setelah menduduki negara-negara yang menjadi tujuan perang Jepang pada PD II, Militer Jepang segera membentuk unit-unit tentara di bawah komando Gubernur-Jendral di masing-masing wilayah pendudukan. Unit-unit militer ini berbeda antara satu negara dengan negara lain, menyesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial-masyarakat.

2.1.2 Garis Komando Militer Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945

Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1942, militer Jepang melakukan reorganisasi pemerintahan. Indonesia ditempatkan di bawah komando Tentara Wilayah Asia Selatan yang di kepalai oleh Marsekal Terauchi Hisaichi yang bertindak sebagai pimpinan tertinggi semua divisi militer Jepang yang menduduki Filipina, Malaysia, dan Indonesia, bermarkas di Dalat, Vietnam. Sedangkan yang menjadi Wakil Kepala Staf Tentara Wilayah Asia Selatan adalah Letnan Jendral Inada Masazumi (Oktorino, 2016: 201).

Di bawah Tentara Wilayah Asia Selatan, ada Tentara Wilayah 7 bermarkas di Singapura yang dipimpin oleh Jendral Kenji Dohihara yang bertugas sebagai komandan pasukan dari April 1944 - April 1945 yang menguasai Jawa, Sumatera, dan wilayah Indonesia lainnya. Sedangkan mulai April 1945 sampai akhir masa perang, komandan Tentara Wilayah 7 dijabat oleh Jendral Itagaki. (Komnas HAM, 2013). Adapun pembagian pemerintahan militer Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah utama yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu:

- 1) Pulau Jawa dan Madura di bawah *Osamu Shudan* (Tentara ke-16) dipimpin oleh Panglima Tentara (*gunshirekan* atau *saiko shikikan*) Kumakichi Harada (November 1942 – April 1945) yang bermarkas di Jakarta. Tentara ke-16 memiliki tugas utama dalam bidang kerjasama politik, penyediaan sumber tenaga kerja dan bahan makanan (beras) untuk diekspor ke seluruh Asia Tenggara.
- 2) Pulau Sumatera di bawah *Tomi Shudan* (Tentara ke-25) dipimpin oleh wakil Admiral Ibo Takashi (April - September 1942), kemudian digantikan oleh wakil Admiral Denshicchi Okouchi (November 1944 – Agustus 1945) yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. *Tomi Shudan* tidak hanya mencakup pulau Sumatera, tetapi juga Semenanjung Malaya yang sebelumnya bekas kekuasaan Inggris. Tentara ke-2 memiliki tugas untuk memenuhi sumber ekonomi perang, khususnya kebutuhan industri perang, seperti karet, minyak (instalasi minyak bumi

Plaju), batu bara (tambang Bukit Asam dan Ombilin), timah, dan bauksit (di Pulau Bintan).

- 3) Indonesia Timur yang mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara berada di bawah kekuasaan *Dai Ni Nankenkantai* (Armada Selatan ke-2) yang bermarkas besar di Makassar, Sulawesi Selatan. Tugas utama tentara Jepang di kawasan Indonesia Timur adalah menguasai lading-ladang minyak di Tarakan dan Balikpapan. Selain itu juga membendung kemungkinan infiltrasi kekuatan sekutu dari Jawa dan Australia (Kemendikbud, 2011).

Di setiap pemerintahan daerah militer Jepang (Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur) dipimpin oleh seorang kepala staf tentara sebagai seorang Gubernur Militer (*Gunseikan*). Dalam setiap unit militer Jepang terdapat unit Angkatan Darat (*kempeitai*), unit Angkatan Laut (*toketai*) dan badan intelijen informan Hindia Belanda, PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*). *Kempetai* dan *toketai* berada di setiap wilayah pendudukan di Indonesia. Merekalah yang bertugas sebagai barisan penjaga dan perekrut warga sipil untuk dijadikan pekerja paksa atau tentara bantuan bagi Jepang (Oktorino, 2016: 204-205).

Di Pulau Jawa dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang, yang dibagi dalam beberapa wilayah pemerintahan militer. Pembagian wilayah dari yang terbesar adalah *shuu* (karisidenan) sejumlah 17 setara dengan *kochi* (kesultanan) sejumlah 2, *ken* (kabupaten) setara dengan *sii* (kotapraja), *gun* (kawedanan), *son* (kecamatan), *ku* (desa), RW dan RT. Di Sumatera pemerintahan militer juga dikendalikan oleh Angkatan Darat, yang membagi wilayah Sumatera menjadi 9 *shuu*, yang dibawahnya terdapat *bunshuu*, *gun*, dan *son*. Sedangkan di Wilayah Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut yang diperintah oleh *minseifu* (Kantor Pemerintahan Sipil) yang diketuai oleh *sokan* (Inspektur Jendra) berpusat di Makassar. Di bawah *minseifu* terdapat 3 *minseibu*, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Minseibu kemudian dibagi menjadi *shuu*, *ken*, *bunken*, *gun*, dan *son* (Oktorino, 2016: 205-206).

2.2 Kebijakan Militer Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945

Setelah Jepang berhasil mengalahkan pasukan Sekutu dan menduduki Indonesia pada tahun 1942, pemerintahan militer Jepang kemudian menerapkan berbagai kebijakan di bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa kebijakan yang diambil oleh militer Jepang diantaranya:

- 1) Gerakan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) adalah sebuah gerakan propaganda yang dibentuk oleh militer Jepang pada tanggal 25 April 1942, bertujuan untuk mendoktrin masyarakat Indonesia agar bersedia mendukung Jepang dalam perang Pasifik dan melancarkan misi “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah Jepang”.
- 2) *Seiji Sanyo* adalah kebijakan pemerintah Jepang tentang pemberian kesempatan kepada orang Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan (partisipasi politik). Kebijakan ini tercermin dari pembentukan dewan-dewan penasihat atau dewan rakyat untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Di tingkat provinsi bernama *Chuo sangi-in*, ditingkat karisidenan bernama *Shu Sangikai* dan tingkat kotapraja bernama *Tokubetsu Shi Sangikai*.
- 3) Swasembada pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, monopoli sumber ekonomi (tambang, perkebunan, bank, pabrik perusahaan, telekomunikasi, dan transportasi) dan perdagangan. Berkaitan dengan kebijakan diatas militer Jepang membentuk *Saibi Kigyo Kanrikodan* (SKK) yang bertugas sebagai badan pengatur ekonomi rakyat dan jual beli hasil perkebunan.
- 4) Poetera (Poesat Tenaga Rakjat) dipimpin oleh “empat serangkai” (Soekarn, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Mas Mansyur), tetapi terdapat penasihat Jepang yang berkuasa menentukan jalannya organisasi tersebut. Poetra bertujuan untuk menghapuskan semua partai dan kegiatan politik yang ada sebelumnya.
- 5) *Jawa Hokokai* dibentuk pada tanggal 29 April 1944 yang berpusat di pulau Jawa merupakan wadah untuk menghimpun semua organisasi yang

bersifat multirasial, yang meliputi organisasi nasionalis, nasionalis islam, perkumpulan pemuda, perempuan, dan kelompok etnik nonpribumi.

- 6) *Seinendan* (Barisan Pemuda) adalah organisasi semi militer yang dibentuk tanggal 29 April 1943, bertugas sebagai barisan cadangan militer yang mengamankan garis belakang. Para pemuda dilatih dalam hal kedisiplinan dan ditanamkan semangat patriotisme serta semangat kepahlawanan Jepang (*bushido*).
- 7) *Keibondan* (Korps Kewaspadaan) merupakan organisasi semi militer yang didirikan tanggal 29 April 1943, bertugas sebagai barisan pembantu polisi untuk menjaga keamanan wilayah setempat. Organisasi ini berada langsung di bawah polisi Jepang.
- 8) *Suishintai* (Barisan Pelopor) didirikan pada 1 November 1944 merupakan organisasi pertama yang memberikan pelatihan kemiliteran untuk pemuda Indonesia, dipimpin oleh Ir. Soekarno. Organisasi ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai.
- 9) *Gakkutotai* (Barisan Pelajar) berisi pelajar putra yang mendapatkan pelatihan dasar militer untuk membantu barisan militer buatan Jepang.
- 10) *Hizbullah* atau *Kaikyo Seinen Teishintai* (Barisan Pemuda Muslim) merupakan barisan semi militer yang didirikan pada 15 Desember 1944. Hizbullah berisi pasukan cadangan khusus untuk mendukung PETA yang terdiri dari para pemuda muslim sebanyak 400.000 orang di bawah naungan Masyumi.
- 11) *Fujinkai* (Perkumpulan Wanita) didirikan pada Agustus 1943 yang bertugas melakukan pelatihan P3K, membantu urusan logistik untuk mendukung tentara Jepang, dan meningkatkan penghidupan rakyat di garis belakang.
- 12) *Jibakutai* (Barisan Berani Mati) dibentuk tanggal 8 Desember 1944, bertugas sebagai barisan terdepan yang rela mati melawan musuh.
- 13) *Heiho* (Prajurit Bantu) didirikan pada 24 April 1943 (di Jawa) dan Mei 1943 (di Sumatera) sebagai barisan militer bantuan bagi Jepang yang terdiri dari mantan prajurit KNIL (Tentara Kerajaan Hindia-Belanda) dan

masyarakat Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai *Heiho*. *Heiho* terdiri dari 2 bagian, yaitu Rikugun *Heiho* (*Heiho Angkatan Darat*) dan Kaigun *Heiho* (*Heiho Angkatan Laut*). Diperkirakan sampai akhir pendudukan Jepang, jumlah anggota *Heiho* mencapai 42.000 orang.

- 14) *Kyodo Boei Giyu-gun* (Pasukan Pembela Tanah Air/PETA) yang didirikan tanggal 8 September 1943, merupakan barisan militer baru yang dibentuk untuk membantu militer Jepang melindungi wilayah Jawa dari Sekutu.
- 15) *Romusha* (Serdadu Pekerja) merupakan sistem kerja paksa yang diciptakan oleh Jepang dengan cara merekrut penduduk pribumi untuk dijadikan buruh kasar di bawah pengawasan militer Jepang. Pelaksanaan *romusha* berada di bawah Badan *Romukokyu* (Kantor Urusan Pekerja). *Romusha* dibagi menjadi 2, yaitu *romusha* lokal (dipekerjakan di wilayah Indonesia selama 1-3 bulan) dan *romusha* yang dikirim keluar wilayah Indonesia (Burma, Malaya, Muangthai selama lebih dari 3 bulan). (Kemendikbud, 2011)

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, militer Jepang juga menerapkan kebijakan-kebijakan lainnya, yang salah satunya adalah kebijakan *Jugun Ianfu* atau *Comfort System* yang diterapkan di semua negara pendudukannya, termasuk Indonesia.

2.3 Kasus-Kasus dan Penyebaran Jugun Ianfu di Indonesia

2.3.1 Kasus-Kasus Jugun Ianfu di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942-1945, Jepang mengeksploitasi tidak hanya hasil pertanian, kekayaan alam, tetapi juga sumber daya manusia Indonesia secara paksa. Kaum lelaki dipaksa bekerja sebagai tenaga kasar bagi kepentingan Jepang, sedangkan kaum perempuan ada yang dimanfaatkan sebagai tambahan tenaga perang, seperti organisasi *Fujinka*¹.

¹ *Fujinkai* adalah satu-satunya organisasi perempuan bentukan Jepang yang merupakan gabungan dari seluruh organisasi perempuan di Indonesia. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang buruk pada saat itu. Anggotanya terdiri dari istri-

Sebagian besar perempuan yang tergabung dalam organisasi ini berasal dari kaum terpelajar atau memiliki hubungan dengan pegawai pemerintahan pada saat itu (Kemendikbud, 2011).

Organisasi Fujinkai merupakan bentuk keterlibatan perempuan dalam sektor formal, sedangkan dari sektor non formal, perempuan dipaksa untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kasar, seperti kerja bakti, tenaga palang merah, maupun sebagai tenaga “perempuan penghibur” atau yang disebut Jugun Ian-fu. Kaum perempuan yang dijadikan jugun ian-fu kebanyakan berasal dari golongan masyarakat yang berpendidikan rendah dan buta huruf, serta berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, tetapi sebagian kecil juga berasal dari golongan masyarakat menengah dan kaum bangsawan (Oktorino, 2016: 232).

Perekrutan jugun ianfu yang dilakukan tentara Jepang secara besar-besaran dan terselubung, telah diketahui oleh pemimpin-pemimpin pergerakan Indonesia pada saat itu, namun mereka tidak dapat melakukan tindakan penentangan karena mengingat perilaku Jepang terhadap kaum pribumi yang tidak mengenal belas kasihan. Perempuan-perempuan dari desa direkrut menjadi jugun ianfu dengan berbagai cara, ada yang menggunakan kekerasan, penipuan seperti tawaran pekerjaan di tempat lain, maupun ancaman secara langsung pada calon jugun ianfu, orang tua, atau keluarga mereka (Djoened & Notosusanto, 2011: 45).

Sekitar 10.000-15.000 perempuan Indonesia dijadikan Jugun ianfu oleh tentara Jepang selama masa pendudukan. Dari jumlah tersebut hanya beberapa kasus jugun ianfu yang muncul ke permukaan karena orang yang bersangkutan ikut memberikan keterangan terkait praktik jugun ianfu yang dilakukan tentara Jepang dan berkontribusi dalam upaya menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang terhadap korban-korban jugun ianfu. Salah satu mantan jugun ianfu asal Indonesia yang ikut berkontribusi dalam penegakan keadilan adalah Mardiyem (Hindra & Koichi, 2007: 20).

Mardiyem adalah mantan jugun ianfu yang berasal dari Pathok Yogyakarta. Mardiyem adalah anak dari pasangan *abdi dalem* (pelayan keraton)

istri pegawai yang bekerja di pemerintahan Jepang. Kegiatan Fujinkai pada umumnya membantu meringankan penderitaan orang banyak (Djoened & Notosusanto, 2011).

bangsawan Yogyakarta bernama Kanjeng Raden Tumenggung Suryotaruno. Mardiyem telah menjadi anak yatim piatu ketika berusia 10 tahun. Ibunya (Wagiyem) meninggal pada tahun 1929 dan ayahnya (Irodjoyo) meninggal tahun 1939. Semenjak ayahnya meninggal, Mardiyem memutuskan untuk tinggal sendiri, karena tidak ingin merepotkan kakak-kakaknya yang sudah berkeluarga. Selama tinggal di lingkungan keraton, Mardiyem bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan penyanyi di pagelaran *ketoprak* keraton (Hindra & Koichi, 2007: 24).

Ketika berusia 13 tahun, Mardiyem mendapatkan tawaran menjadi seorang penyanyi di Borneo dari salah satu anggota ketoprak bernama Miss Lentji. Mardiyem yang bercita-cita menjadi seorang penyanyi langsung menerima tawaran tersebut. Setelah melewati proses perekrutan secara tertutup, termasuk tes kesehatan, Mardiyem dan rombongan yang berjumlah 48 orang (rata-rata berusia 16-22 tahun) diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta ke Surabaya. Setelah sampai di Surabaya, rombongan dijemput oleh truk tentara Jepang dan dibawa ke pelabuhan untuk disebrangkan ke Borneo menggunakan Kapal *Nichimaru*. Sesampainya di Borneo Mardiyem dan rombongan diangkut dengan truk tentara Jepang dan dibawa ke asrama Telawang, Banjarmasin. Disana Mardiyem dan rombongan dipaksa memasuki kamar-kamar yang sudah disediakan untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang. Mardiyem menempati kamar nomor 11 dan dinamai *Momoye*. Setiap harinya Mardiyem terpaksa harus melayani 5-10 tentara Jepang yang datang. Ketika Mardiyem ketahuan hamil, ia dipaksa untuk menggugurkan kandungannya dengan cara perutnya ditekan dengan keras oleh pemilik *ian-jo* (Hindra & Koichi, 2007: 26).

Setelah kekalahan Jepang Mardiyem berhasil kabur dari asrama dan tinggal di daerah kampung Belitung. Mardiyem menikah dengan Ahmad Mingun seorang penjaga pos di markas Kompi KNIL pada tahun 1946 dan dikarunia seorang putra. Kemudian pada tahun 1953, Mardiyem bersama keluarganya memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta. Pada awalnya, lingkungan masyarakat sekitar Mardiyem bersikap ramah dan baik kepada keluarga Mardiyem. Namun, perlakuan masyarakat berubah setelah Mardiyem melaporkan dirinya sebagai

mantan Jugun ianfu ke Lembaga bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta untuk berjuang mencari keadilan menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang terhadap korban-korban jugun ianfu asal Indonesia (Hindra & Koichi, 2007: 30).

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang melakukan pendataan terhadap mantan jugun ianfu berhasil mencatat kurang lebih 1.156 orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Namun, banyak mantan jugun ianfu yang tidak mau melaporkan dirinya (Komnas HAM, 2010). Adapun nama-nama mantan jugun ianfu lainnya yang ikut melaporkan diri dan menjadi saksi bagi pemerintah Indonesia ditunjukkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Nama-nama mantan Jugun Ianfu di Indonesia

No.	Nama	Status	Asal
1.	Mardiyem	Meninggal tahun 2007	Yogyakarta
2.	Sarmini	Meninggal tahun 1993	Yogyakarta
3.	Lasiyem	Meninggal tahun 1995	Yogyakarta
4.	Sukarni	Meninggal tahun 2005	Yogyakarta
5.	Suharti	Meninggal tahun 2006	Blitar
6.	Suhanah	Masih hidup	Cimahi
7.	Emi	Masih hidup	Cimahi
8.	Kastimah	Meninggal tahun 2004	Cimahi
9.	Siti Neng Ijuh	Masih hidup	Garut
10.	Olis Kartini	Meninggal tahun 2002	Bandung
11.	Omoh	Meninggal tahun 1997	Bandung
12.	Cici Suarsih	Masih hidup	Bogor
13.	Juwariyah	Meninggal tahun 2005	Bogor
14.	Sumiyati	Masih hidup	Kediri

Sumber: Komnas HAM, 2010

2.3.2 Penyebaran Jugun Ianfu di Indonesia

Paska Jepang menduduki wilayah Indonesia pada Maret 1942, militer Jepang mulai menerapkan sistem jugun ianfu di setiap wilayah Indonesia yang telah dikuasai. Perekrutan jugun ianfu dilakukan secara masal dan terorganisir.

1) Jugun Ianfu di Wilayah Jawa

Setelah berhasil menduduki Pulau Jawa, petinggi militer Jepang kemudian memberikan perintah untuk segera menjalankan sistem jugun ianfu, baik di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun Yogyakarta. Sasaran dari militer Jepang tidak hanya perempuan-perempuan pribumi, tetapi juga perempuan Belanda yang saat itu masih menempati wilayah Indonesia. Jan O'Herne (19 tahun) adalah seorang perempuan asal Belanda yang tinggal di Bandung. Setelah invasi Jepang ke pulau Jawa, ia disekap dalam suatu kamp bersama perempuan muda lainnya, kemudian ddi bawa ke rumah hiburan di Selarang untuk dijadikan jugun ianfu (Komnas HAM, 2013).

Di Jawa Tengah, ditemukan empat kamp di Semarang, dua kamp di Ambarawa, dan satu kamp di Cepu yang digunakan untuk tempat jugun ianfu. Di Cepu, para perempuan berusia 17-35 tahun disekap di sebuah rumah sakit dan diperkosa oleh tentara Jepang, termasuk di dalamnya ada perempuan asal Belanda. Hal ini dibenarkan oleh Letnan Kolonel Damste, seorang Belanda yang menjadi salah satu penuntut di IMTFE. Selain itu, kasus jugun ianfu juga ditemukan di Blora, dimana 20 perempuan pribumi dan Belanda di sekap dalam sebuah rumah dan diperkosa selama 3 minggu oleh tentara Jepang (Komnas HAM, 2013).

Di Jakarta juga terjadi perekrutan jugun ianfu secara paksa. Berdasarkan keterangan dari seorang gadis berusia 18 tahun dan kakak perempuannya 19 tahun, mereka diminta melapor ke pangkalan polisi setempat. Tetapi di pangkalan tersebut, ternyata sudah ada kurang lebih 100 perempuan (Cina, Jawa, Eropa) yang menunggu. Mereka kemudian dipindahkan secara paksa oleh tentara Jepang ke Semarang, kemudian dari Semarang didistribusikan ke daerah-daerah lain. Militer Jepang mendirikan tempat hiburan di Pulau Jawa di daerah Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Malang. Apabila dibandingkan dengan pulau lain, penduduk di Pulau Jawa lebih merasakan kekerasan dan kekejaman Jepang karean militer Jepang terkonsentrasi di Jawa, sehingga banyak tempat hiburan yang melibatkan Kempetai (Hindra & Koichi, 2007: 40).

2) Jugun Ianfu di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Di Pulau Sumatera, perempuan-perempuan jugun ianfu disebut dengan *Jalan Ps*, karena mereka sering terlihat diikuti unit patroli Jepang. Salah satu jugun ianfu asal Bangka menceritakan kisahnya ketika direkrut menjadi jugun ianfu. Saat itu ia berusia 20 tahun, tetapi sudah menjadi janda. Ia ditawarkan pekerjaan oleh tentara Jepang. Karena kondisi keluarganya yang miskin dan ia membutuhkan pekerjaan untuk perawatan orangtuanya, maka ia ikut tentara Jepang tersebut. Ia tidak mengetahui bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi jugun ianfu, kemudian ia dibawa ke suatu tempat hiburan dan dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara-tentara Jepang (Komnas HAM, 2013).

Dalam IMTFE, Taichiro Kaijimura memberikan kesaksian tentang tindakan prostitusi paksa yang dilakukan militer Jepang. Di kamp-kamp daerah Aceh, Brastagi, Palembang, dan Padang terdapat laporan tentang penyekapan perempuan asal Indonesia dan Australia. Di Palembang, 32 perawat asal Australia dan kurang lebih 500 perempuan asal Indonesia ditahan disebuah rumah dekat kamp tentara Jepang. Mereka menggunakan rumah tersebut sebagai tempat hiburan dan perempuan-perempuan tahanan tersebut dipaksa untuk menjadi jugun ianfu. Apabila menolak, akan langsung disiksa bahkan ditembak mati (Komnas HAM, 2013)

3) Jugun Ianfu di Wilayah Sulawesi

Praktik prostitusi paksa di Sulawesi pertama kali dicetuskan oleh Jendral Anami. Militer Jepang kemudian mendirikan tempat hiburan yang berpusat di Manado dan wilayah sekitar Makassar. Perempuan-perempuan yang dijadikan jugun ianfu sebagian besar berasal dari Minahasa. Setelah Perang Dunia II berakhir, terdapat laporan dari Parepare yang menyatakan sedikitnya ada 29 tempat prostitusi yang didirikan tentara Jepang di Pulau Sulawesi, yang terletak di wilayah Parepare, Makassar, Bulukumba, Makale, Singkang, dan Menado. Jumlah perempuan yang dijadikan jugun ianfu kurang lebih 280 orang, 111 orang Toraja, 67 orang Jawa, 7 orang Makassar, 4 orang Cina, dan sisanya asal Bugis, Karo, dan lain-lain (Komnas HAM, 2013).

Di Sulawesi Utara, terdapat dua buah tempat prostitusi di daerah Manado dan Tomohon yang dioperasikan seorang pegawai Jepang. Di sana terdapat kurang lebih 100 perempuan yang dijadikan jugun ianfu. Perempuan-perempuan itu sebagian besar berasal dari kampung-kampung di Minahasa. Kondisi jugun ianfu disana tergolong lebih baik, karena mereka diberikan makanan dan pakaian yang layak. Terkadang mereka juga diberikan imbalan. Namun, pada dasarnya mereka tetap dipekerjakan secara paksa (Komnas HAM, 2013).

4) Jugun Ianfu di Wilayah Bali

Di Bali, salah satu tempat prostitusi berada di Denpasar, yaitu Hotel Wongaye. Berdasarkan keterangan dari mantan penjaga hotel, disana hanya ada 20 perempuan jugun ianfu. Sebagian dari mereka direkrut secara paksa oleh tentara Jepang. Tentara Jepang yang datang akan ditunjukkan foto dari para jugun ianfu, kemudian mereka harus membeli tiket. Setiap tentara diberikan waktu selama 30 menit. Para jugun ianfu tidak dapat menolak siapapun tentara yang datang, karena mereka takut akan dibunuh (Komnas HAM, 2013).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan Jepang menyerah kepada sekutu tahun 1945, ada jugun ianfu yang dikembalikan ke wilayah asal mereka, namun sebagian besar ditinggalkan begitu saja di wilayah-wilayah yang jauh dari tempat asal mereka. Salah satunya adalah Pulau Buru yang terpencil dan asing, sehingga mantan jugun ianfu mengalami kesulitan untuk kembali sendiri ke daerah asalnya. Sebagian dari mereka akhirnya menetap disana dan dijadikan istri oleh orang-orang asli Buru (Ananta T, 2007).

Masalah-masalah lain yang dialami mantan jugun ianfu dikemukakan oleh Eka Hindra dan Koichi Kimura dalam bukunya "*Momoye Mereka Memanggilku*", adalah: 1) Kesehatan yang buruk akibat kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami, sebagian besar dari mantan jugun ianfu meninggal karena tidak mendapatkan perawatan kesehatan. 2) Trauma akibat perbudakan seks yang dialami pada usia yang masih sangat muda. 3) Tekanan sosial dari masyarakat yang menganggap mereka pelacur dan manusia kotor, akibat tidak adanya informasi yang benar mengenai jugun ianfu yang sampai ke

masyarakat. 4) Hidup dalam kemiskinan karena ditolak untuk bekerja di masyarakat, dengan alasan bekas pelacur (Hindra & Koichi, 2007: 24).

2.4 Kesimpulan

Dalam Perang Dunia II, militer Jepang memiliki peran yang signifikan sebagai sebuah organisasi yang menjalankan semua kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang. Militer Jepang yang terdiri dari dua bagian yaitu Angkatan Darat Kekaisaran dan Angkatan Laut Kekaisaran berada langsung di bawah kepemimpinan Kaisar Jepang sebagai pusat komando. Rezim militer diterapkan oleh pemerintah Jepang di setiap negara pendudukannya untuk mempermudah pencapaian kepentingan Nasional Jepang, yaitu memenangkan peperangan melawan sekutu. Berbagai kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya berbasis militer diterapkan oleh Jepang untuk mendukung kepentingan Jepang. Diantaranya, kebijakan romusha, pembentukan barisan militer maupun semi militer, seperti PETA, heiho, Keibondan, Seinendan, Fujinkai, dan lain-lain. Selain itu, berbagai propaganda disebar untuk membentuk ideologi masyarakat Indonesia, seperti gerakan 3A. Nilai-nilai kebudayaan Jepang juga ditanamkan kepada masyarakat Indonesia.

Salah satu kebijakan Jepang yang menjadi bentuk kejahatan perang adalah *Jugun Ianfu* atau Perbudakan Seksual. Perempuan-perempuan di negara pendudukan Jepang, dipaksa untuk menjadi budak pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang. Praktik ini dijalankan oleh militer Jepang secara terorganisir mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Perekrutan wanita yang akan dijadikan jugun ianfu dilakukan dengan metode pemaksaan, penipuan, atau ancaman. Sekitar 10.000-15.000 perempuan dari seluruh wilayah Indonesia terpaksa menjadi jugun ianfu. Adapun penyebaran jugun ianfu berasal dari wilayah pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Bali. Pada bab selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut mengenai jugun ianfu sebagai bentuk kejahatan perang Jepang di Indonesia serta analisis faktor penyebab Militer Jepang melakukan kejahatan perang berupa jugun ianfu.